



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVA PRAYOGA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 724742

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 640 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOS 1.300 MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 550.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 512.050.000

III. HUTANG Rp. 509.970.848

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.079.152

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.